



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAKESBANGPOL

Dalam Angka



TAHUN 2018

Kata Pengantar

Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara sejak berdirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang idiologi kebangsaan, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana yang berada di wilayahnya, seiring dengan pembentukan lembaga dan dinas teknis daerah lainnya maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara terbentuklah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, dan selanjutnya Penanggulangan Bencana berubah menjadi lembaga tersendiri yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural lainnya pada tanggal 10 Juli 2014 di Gedung Serbaguna Kantor Gubenur Kalimantan Utara Jalan Agathis Tanjung Selor.

Drs. Basiran, M.Si.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara

VISI & MISI

Visi “Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”.

Diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan permasalahan mendasar serta isu strategis yang terjadi di Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.

Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Utara realitasnya masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu adalah kondisi geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

V
I
S
I

M
I
S
I

Pembangunan Kalimantan Utara 2016-2021 mengemban visi yang harus direalisasikan adalah “Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” yang diwujudkan melalui sinergi tiga pokok visi yaitu : (1) Visi Mandiri, (2) Visi Aman dan Damai, (3) Visi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka analisis terhadap misi Kepala Daerah Terpilih diarahkan pada misi ke 2 (Dua): Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai dan misi ke 3 (Tiga): Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa, telaahan terhadap misi 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan.

Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

2) Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

TUGAS POKOK & FUNGSI

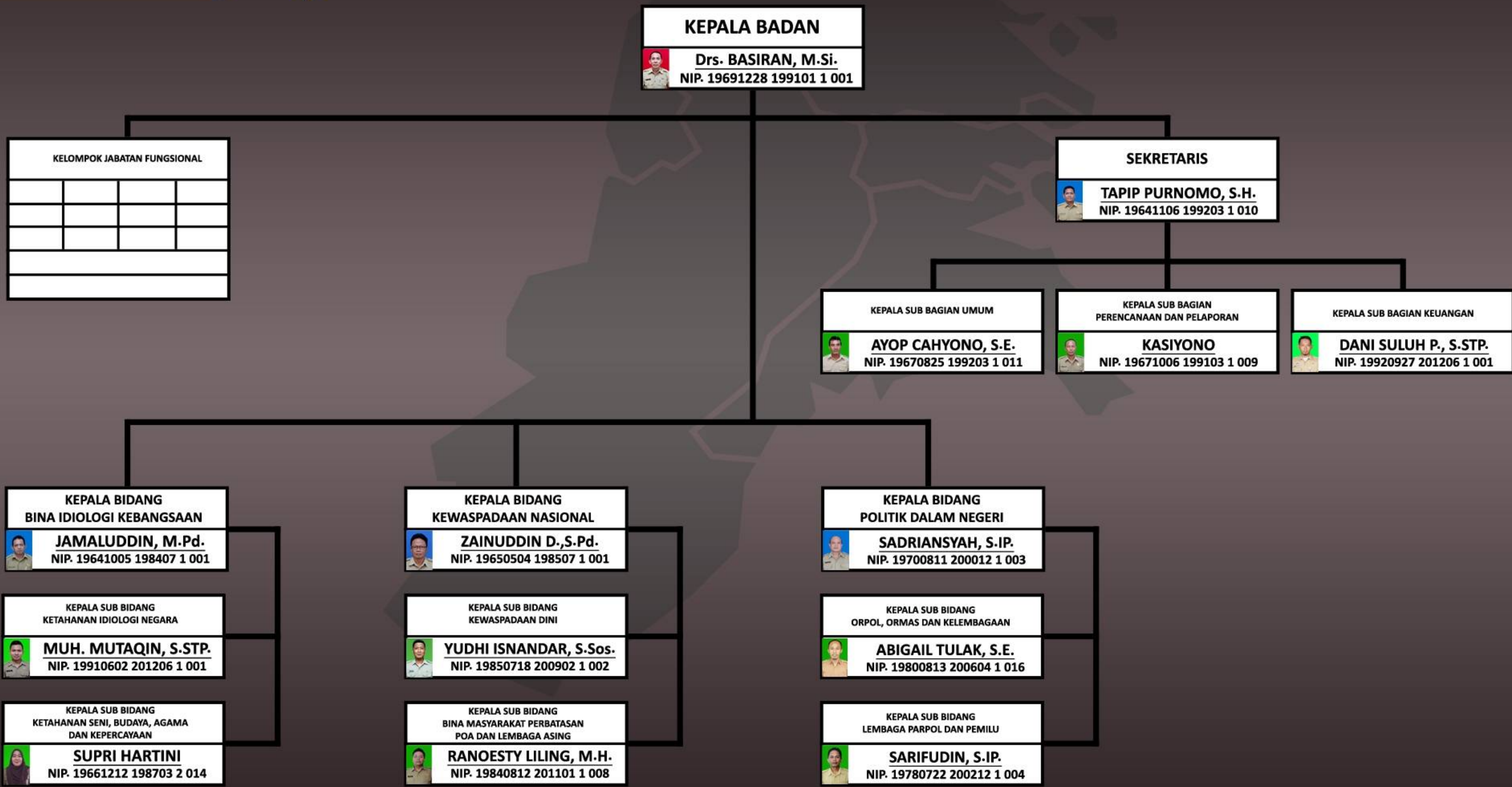
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan idiologi kebangsaan;
- d. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang politik dalam negeri;
- e. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang kewaspadaan nasional;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA (BERDASARKAN PERGUB NO. 10 TAHUN 2014)



PROGRAM & KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program yang dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang di rencanakan untuk Periode Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

1.1. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6. Pendidikan Politik Masyarakat

1.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
8. Penyediaan komp instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12. Penyediaan makanan dan minuman kantor
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
14. Rapat-rapat koordinasi, pemb dan pengw di dalam daerah ke luar daerah
15. Penyewaan rumah/gedung/gudang dan parkir kantor
16. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
17. Pengadaan pakaian kerja lapangan
18. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
19. Pendidikan dan pelatihan formal
20. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
21. Penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
22. Pengendalian konflik sosial di masyarakat
23. Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat
24. Peningkatan kerjasama pengawasan orang asing dan lembaga asing
25. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
26. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
27. Peningkatan kesadaran masy. akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
28. Pencapaian halaqoh dan forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

29. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
30. Penyuluhan politik kepada masyarakat
31. Peningkatan kapasitas partai politik
32. Peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas dan kelembagaan
33. Sosialisasi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di kalimantan utara
34. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada

SEKRETARIAT

Masa Kerja

1 - 5	: 13
6 - 10	: 4
11 - 15	: 5
16 - 20	: 3
21 - 25	: 2
26 - 30	: 5

Pendidikan

SMA	: 6
D3	: 3
S1	: 18
S2	: 5

JUMLAH PNS

32

Golongan

Golongan IV	: 5
Golongan III	: 20
Golongan II	: 7

Usia

20 - 25	: 3
26 - 30	: 7
31 - 35	: 6
36 - 40	: 4
41 - 45	: 3
46 - 50	: 3
51 - 55	: 6
56 - 60	: 0

CUTI
TAHUNAN
10 Orang



CUTI
ALASAN
PENTING
11 Orang

IZIN
5 Orang

SAKIT
8 Orang

PERJALANAN



DINAS

Dalam
Provinsi



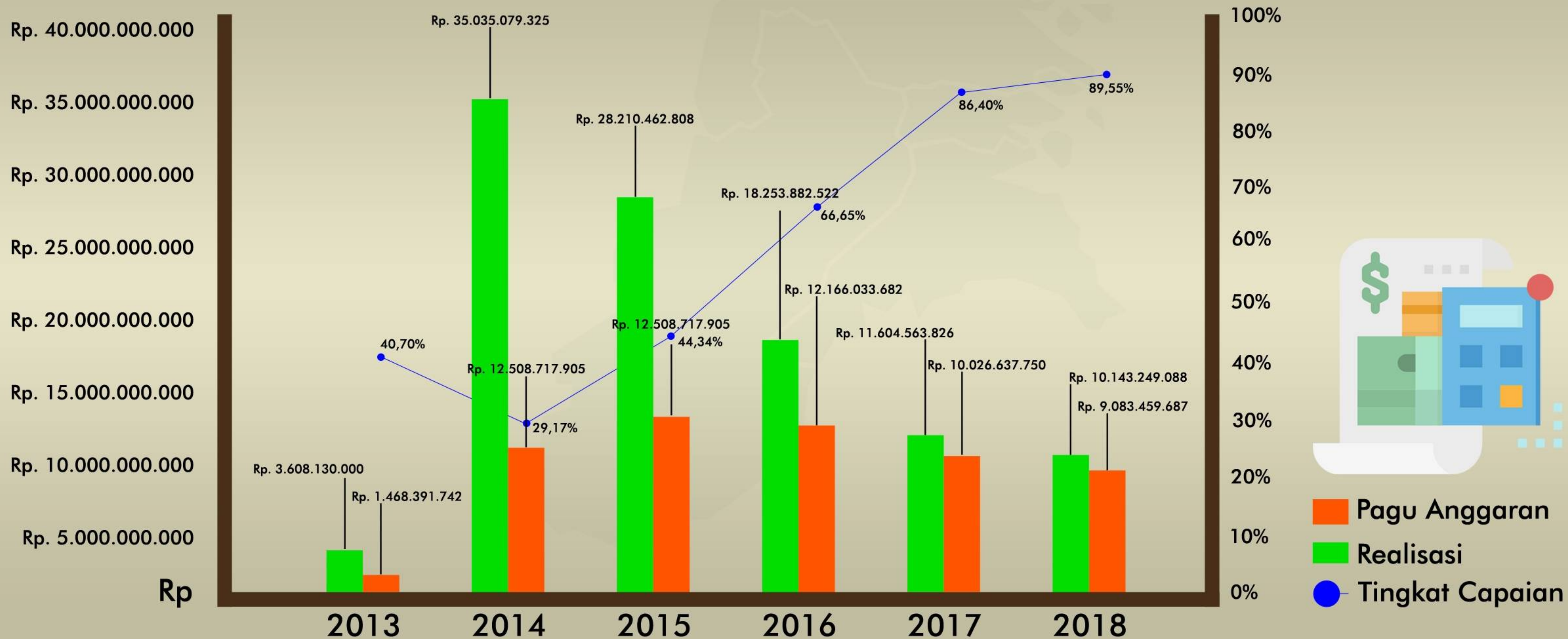
296 SPT
(Surat Perintah Tugas)
542 SPPD
(Surat Perintah Perjalanan Dinas)

Luar
Provinsi



91 SPT
(Surat Perintah Tugas)
172 SPPD
(Surat Perintah Perjalanan Dinas)

SEKRETARIAT



Capaian Kinerja SAKIP 2013-2018



Data Rumah Ibadah



753 Masjid (Langgar/Musholla)

- Bulungan	313
- Malinau	48
- Tana Tidung	43
- Nunukan	206
- Tarakan	143

3 Kelenteng

- Bulungan	1
- Malinau	0
- Tana Tidung	0
- Nunukan	1
- Tarakan	1



640 Gereja (Kristen & Khatolik)

- Bulungan	169
- Malinau	209
- Tana Tidung	24
- Nunukan	144
- Tarakan	94



3 Pura

- Bulungan	1
- Malinau	1
- Tana Tidung	0
- Nunukan	0
- Tarakan	1



6 Vihara

- Bulungan	1
- Malinau	1
- Tana Tidung	0
- Nunukan	1
- Tarakan	3

1.405
RUMAH IBADAH

188 Tokoh Masyarakat/ Adat



* Bulungan	40
* Malinau	74
* Tana Tidung	6
* Nunukan	18
* Tarakan	50

474 Sanggar Seni & Budaya



* Bulungan	177
* Malinau	122
* Tana Tidung	48
* Nunukan	108
* Tarakan	19

GERAKAN Revolusi Mental NASIONAL

Data Kepengurusan Revolusi Mental

* Provinsi	1	* Tana Tidung	0
* Bulungan	0	* Nunukan	0
* Malinau	0	* Tarakan	0

FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama

Data Kepengurusan FKUB

* Provinsi	1	* Tana Tidung	1
* Bulungan	1	* Nunukan	1
* Malinau	1	* Tarakan	1

Program Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh FKUB

1. Rapat Koordinasi Nasional FKUB
2. Konferensi Nasional IV FKUB

FPK

Forum
Pembauran
Kebangsaan

Data Kepengurusan FPK

* Provinsi	1	* Tana Tidung	0
* Bulungan	1	* Nunukan	1
* Malinau	1	* Tarakan	1

Program Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh FPK

- * Rapat Kerja FPK Se-Kalimantan Utara

PPWK

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Data Kepengurusan PPWK

* Provinsi	1	* Tana Tidung	0
* Bulungan	0	* Nunukan	1
* Malinau	0	* Tarakan	0

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL



Potensi Konflik Sosial

6 Potensi

* Bulungan	2
* Malinau	2
* Tana Tidung	0
* Nunukan	1
* Tarakan	1



Demonstrasi

16 Aksi

* Bulungan	2
* Malinau	0
* Tana Tidung	0
* Nunukan	2
* Tarakan	12



Narkoba

40 Kasus

* Bulungan	1
* Malinau	0
* Tana Tidung	0
* Nunukan	23
* Tarakan	16



Pemegang KITAS

236 KITAS

* Bulungan	126
* Malinau	6
* Tana Tidung	48
* Nunukan	30
* Tarakan	26

*) Sumber : Kantor Imigrasi



*) Sumber : Kantor Imigrasi

Tenaga Kerja Asing

165 TKA

* Bulungan	118
* Malinau	4
* Tana Tidung	5
* Nunukan	27
* Tarakan	11



Rekomendasi Penelitian

31 Surat



Rapat KOMINDA

12 Rapat



**Data Pemilih Tetap
Pemilihan Umum Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Utara**

	 TPS			
 Kabupaten Bulungan	436	50.456	45.177	95.633
 Kabupaten Malinau	290	27.966	24.538	52.504
 Kabupaten Nunukan	756	70.618	62.121	132.739
 Kota Tarakan	628	79.239	75.025	154.264
 Kabupaten Tana Tidung	73	7.950	7.018	14.968
	2.183	236.229	213.879	450.108

**Data Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas
Pemilihan Umum Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Utara**

Tuna Daksa
237 

Tuna Netra
122 

Tuna Grahita
140 

Tuna Rungu/Bicara
219 

Lainnya
295 

Total
1.013 

*) Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Utara

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Data Organisasi Kemasyarakatan (Desember 2018)



23 SKT
(Surat Keterangan Terdaftar)

82 SKL
(Surat Keterangan Laporan)

Bantuan Keuangan pada Ormas yang dibentuk
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
(Desember 2018)



- **Rp 2,5 Milyar**
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- **Rp 200 Juta**
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- **Rp 200 Juta**
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Dana Bantuan Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2018 (Rp 8.610,92/Suara)



Rp **358.481.210,52**
Partai Demokrat
5 Kursi, 41.641 Suara



Rp **169.359.574,56**
Partai Nasional Demokrat
2 Kursi, 19.668 Suara



Rp **311.456.976,40**
Partai Golkar
4 Kursi, 36.170 Suara



Rp **160.154.501,08**
Partai Kebangkitan Bangsa
2 Kursi, 18.599 Suara



Rp **302.415.510,40**
Partai Hanura
4 Kursi, 35.120 Suara



Rp **153.041.881,16**
Partai Keadilan Sejahtera
2 Kursi, 17.773 Suara



Rp **294.019.863,40**
PDI Perjuangan
4 Kursi, 34.145 Suara



Rp **131.342.362,76**
Partai Bulan Bintang
2 Kursi, 15.253 Suara



Rp **255.115.726,84**
Partai Gerindra
4 Kursi, 29.627 Suara



Rp **108.256.486,24**
Partai Persatuan Pembangunan
2 Kursi, 12.572 Suara



Rp **184.781.732,28**
Partai Amanat Nasional
3 Kursi, 21.459 Suara



Rp **71.573.967,68**
PKP
1 Kursi, 8.312 Suara



Total : Rp **2.499.999.792,68**
35 Kursi (290.339 Suara)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA



kesbangpol.kaltaraprov.go.id